

PROGRAM BATIK RAMLI SEBAGAI INOVASI SOSIAL DALAM PENINGKATAN KAPABILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Kadek Dwi Ariyanto¹, Diaz Kurnia Pentasandi², Tria Baeti Setiadini³, Lintang Akbar⁴

Fuel Terminal Manager PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Madiun¹

Supervisor HSSE PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Madiun²

Community Development Officer PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Madiun³

Community Development Officer PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Madiun⁴

Email: kadekdwiariyanto@pertamina.com

Abstract

The attempts to actualize equal access in fulfilling the rights and self-development for Persons with Disabilities in Indonesia are still followed by conditions of helplessness for these vulnerable group. Whereas, the idea of implementing an inclusive approach has become a shared vision for various stakeholders so that the inclusion of Persons with Disabilities can be actively involved as subjects in the development process. In respond to this phenomenon, PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Madiun initiated a new approach to empower People with Disabilities which was configured in the Batik Ramli Social Innovation Program (Batik Ramah Lingkungan). Mentioned social innovation initiative has been conducted since 2021 and collaborates with various stakeholders in Karangrejo Village, Wungu District, Madiun Regency, East Java Province. This article discusses the development process of Batik Ramli Social Innovation from the initial stages to its achievements in generating systemic change. The approach used in discussing the development of Batik Ramli Social Innovation is a qualitative method. The results of the study show that the Batik Ramli Program has gone through various gradual and inclusive processes in empowering Persons with Disabilities on the basis of productive activities in the creative industry and agribusiness sectors. Batik Ramli has also brought systemic changes so that it can improve the standard of living in a multidimensional manner which includes social, economic, environmental and well-being aspects.

Keywords: Social Innovation, People with Disabilities, Community Empowerment

Abstrak

Upaya mewujudkan kesetaraan akses dalam pemenuhan hak dan pengembangan diri bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia masih disertai dengan kondisi ketidakberdayaan kelompok rentan tersebut. Padahal, angan untuk mengimplementasikan pendekatan yang inklusif telah menjadi visi bersama bagi berbagai pemangku kepentingan agar terwujud pelibatan Penyandang Disabilitas untuk dapat aktif terlibat sebagai subjek dalam proses pembangunan. Menanggapi fenomena tersebut, PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Madiun menginisiasi cara baru untuk memberdayakan penyandang Disabilitas yang dikonfigurasi dalam Program Inovasi Sosial Batik Ramli (Batik Ramah Lingkungan). Inisiatif inovasi sosial tersebut telah berjalan sejak tahun 2021 dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Desa Karangrejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Artikel ini membahas terkait proses pengembangan Inovasi Sosial Batik Ramli mulai dari tahap awal hingga pencapaiannya dalam menciptakan perubahan sistemik. Pendekatan yang digunakan dalam membahas pengembangan Inovasi Sosial Batik Ramli adalah metode kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Program Inovasi Sosial Batik Ramli telah melalui berbagai proses secara gradual dan inklusif dalam memberdayakan Penyandang Disabilitas dengan basis kegiatan produktif pada sektor industri kreatif dan agribisnis. Inovasi Sosial Batik Ramli juga telah menimbulkan perubahan sistemik sehingga mampu meningkatkan taraf kehidupan secara multidimensi yang mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan kesejahteraan.

Kata Kunci: Inovasi Sosial, Penyandang Disabilitas, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

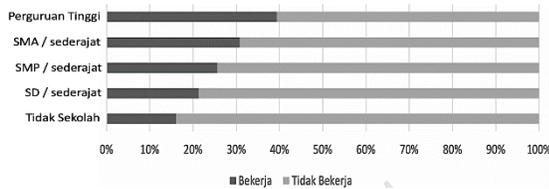
Kondisi ketidakberdayaan Penyandang Disabilitas merupakan salah satu poin yang kerap disoroti dalam pembahasan Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia. Utamanya, Penyandang Disabilitas mengalami ketidakberdayaan dalam konteks sosial-ekonomi. Padahal, secara prinsip para Penyandang Disabilitas memiliki kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan akses terhadap pengembangan potensi agar dapat berdaya secara sosial dan ekonomi. Kesetaraan tersebut seharusnya bersifat universal sehingga tidak memandang keterbatasan fisik, sensorik, kognitif, maupun emosional yang dialami oleh Penyandang Disabilitas. Penerapan prinsip kesetaraan yang universal terhadap Penyandang Disabilitas diharapkan dapat membuka akses terkait pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, transportasi, informasi, dan partisipasi sosial sehingga mampu mendorong timbulnya keberdayaan dalam menjalankan fungsi sosial-ekonomi secara mandiri.

Secara kuantitas, dalam kurun waktu sekitar satu dekade pada rentang tahun 2010-2020, jumlah Penyandang Disabilitas yang terdata di Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 pemerintah melaporkan terdapat sekitar 11,58 juta jiwa yang tercatat sebagai Penyandang Disabilitas (Kemenkes, 2014). Sekitar satu dekade kemudian, Penyandang Disabilitas di Indonesia terdata sebanyak 22,97 juta jiwa pada tahun 2020 (DPR, 2022). Terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia yang persentasenya mencapai sekitar 98,35%. Mempertimbangkan jumlah populasi Penyandang Disabilitas yang cukup signifikan, maka perlu dilakukan kolaborasi sinergis untuk mengupayakan pemberdayaan secara inklusif agar terbuka akses untuk keterlibatannya dalam pembangunan nasional. ILO (2013) memperkirakan bahwa potensi PDB yang berpeluang hilang apabila tidak melibatkan Penyandang Disabilitas dalam angkatan kerja secara optimal dapat mencapai 3 hingga 7 persen.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi penerapan demokrasi Pancasila telah memiliki komitmen yang kuat dalam mengupayakan keadilan sosial bagi Penyandang Disabilitas. Pada tataran internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) tahun 2011 lalu. Kemudian, Pemerintah Republik Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang tersebut merupakan payung hukum dalam mengatur kesetaraan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk dapat memperoleh akses terhadap hak-hak dasar dan mengembangkan potensi serta berkontribusi sebagai subjek dalam pembangunan.

Pembangunan yang inklusif di Indonesia memiliki keterkaitan dengan kondisi tingkat pendidikan dari Penyandang Disabilitas. Berkaitan dengan pendidikan, hasil pendataan mencatat bahwa mayoritas Penyandang Disabilitas hanya menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat dengan persentase 33,77%. Kemudian, sekitar 18,12% Penyandang Disabilitas di Indonesia masih belum menamatkan pendidikan tingkat sekolah dasar. Persentase yang mendominasi kedua adalah jumlah Penyandang Disabilitas yang tidak pernah menempuh sekolah sama sekali yang mencapai sekitar 21,09%. Sementara itu, Penyandang Disabilitas yang telah menempuh pendidikan hingga tingkat sekolah menengah ada sekitar 10,25% untuk tingkat sekolah menengah pertama, dan 12,88% untuk tingkat sekolah menengah atas. Persentase paling sedikit adalah Penyandang Disabilitas yang telah menempuh tingkat pendidikan perguruan tinggi yang hanya mencapai sekitar 3,9% (BPS, 2023).

Grafik 1. Kondisi Bekerja Penyandang Disabilitas Berdasarkan Tingkat Pendidikan

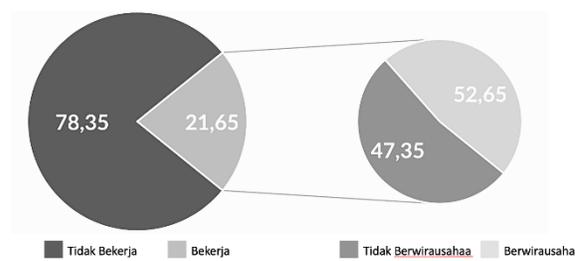


Sumber: BPS, 2023

Selain kondisi tingkat pendidikan, pembangunan yang inklusif juga perlu memperhatikan kondisi pekerjaan dari Penyandang Disabilitas. Kondisi tersebut dapat diketahui dengan melihat bagaimana persentase status bekerja dari masing-masing tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh Penyandang Disabilitas. Data dari Pemerintah Republik Indonesia tahun 2020 menunjukkan bahwa terkait Penyandang Disabilitas yang telah menempuh pendidikan perguruan tinggi, sekitar lebih dari 48% telah memiliki status bekerja, sedangkan sisanya masih belum bekerja. Kemudian, untuk Penyandang Disabilitas yang telah menempuh pendidikan tingkat sekolah menengah atas, sekitar 30% sudah memiliki status bekerja, sedangkan sisanya masih belum memperoleh pekerjaan.

Sementara itu, untuk Penyandang Disabilitas yang tidak sekolah, menamatkan sekolah dasar, dan sekolah menengah tingkat pertama, masing-masing hanya terdapat kurang dari 30% yang telah berstatus bekerja (BPS, 2023). Data tersebut mengindikasikan bahwa persentase Penyandang Disabilitas yang telah memperoleh pekerjaan di Indonesia masih kurang dari 22%.

Grafik 2. Gambaran Komposisi Status Bekerja Penyandang Disabilitas di Indonesia



Sumber: BPS, 2023

Apabila dilihat secara lebih rinci kondisi Penyandang Disabilitas masih didominasi oleh status tidak bekerja. Sekitar 78,35% Penyandang Disabilitas di Indonesia tercatat belum memiliki pekerjaan. Hanya sekitar 21,65% saja Penyandang Disabilitas yang tercatat telah memiliki pekerjaan. Secara lebih spesifik, dari 21,65% Penyandang Disabilitas yang bekerja, sekitar 47,35% diantaranya bukan melakukan kegiatan wirausaha atau merupakan pekerja/buruh. Rekapitulasi data lain menyampaikan bahwa pada komposisi Penyandang Disabilitas yang berstatus pekerja, 25,22% diantaranya merupakan pekerja terampil di bidang pertanian, 25,22% sebagai tenaga usaha jasa dan tenaga penjualan, 21,78% menjadi buruh kasar, 10,55% bekerja sebagai pekerja pengolahan, dan sisanya bekerja pada jenis profesi lainnya. Sementara itu, sekitar 52,65% sisanya bekerja sebagai pelaku wirausaha (BPS, 2023). Dengan kata lain, mayoritas Penyandang Disabilitas di Indonesia yang telah memiliki pekerjaan berprofesi sebagai wirausaha.

Penjabaran data di atas menunjukkan indikasi bahwa Penyandang Disabilitas di tingkat nasional masih mengalami kesulitan dalam mengakses kesempatan kerja. Indikasi pertama terlihat dari persentase kondisi Penyandang Disabilitas di Indonesia yang berstatus tidak bekerja. Kedua, Penyandang Disabilitas yang bekerja rupanya juga didominasi oleh profesi berwirausaha, bukan sebagai pekerja. Ketiga, semakin rendah tingkat pendidikan Penyandang Disabilitas, diikuti dengan semakin rendahnya persentase yang telah memiliki pekerjaan (lihat Grafik 1).

Gambaran dari data-data tersebut menandakan bahwa masih terdapat banyak tantangan dalam melibatkan Penyandang Disabilitas di Indonesia pada pembangunan secara inklusif. Sebuah studi menekankan bahwa beberapa tantangan yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia dalam mewujudkan akses peluang kerja yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas mencakup kurangnya sumber daya khusus yang menangani disabilitas, terbatasnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas, kurangnya data yang komprehensif mengenai prevalensi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas, serta adanya stigma sosial (Rohwerder, 2018).

Tingginya persentase Penyandang Disabilitas di Indonesia yang belum memiliki pekerjaan memiliki keterkaitan dengan stigma yang masih dialami sebagai salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Stigma terhadap Penyandang Disabilitas timbul ketika terdapat pelabelan, stereotip atau persepsi negatif terhadap suatu label, prasangka (generalisasi stereotip yang negatif, terjadi secara simultan dan mendorong munculnya diskriminasi bagi individu atau kalangan yang terstigmatisasi tersebut. Bagi individu atau kalangan yang mengalami stigmatisasi, kondisi tersebut dapat menyebabkan pihaknya menjadi tidak berdaya (Mostert, 2016). Stigma mendorong munculnya respons negatif dari oknum yang melakukan kepada Penyandang Disabilitas seperti melalui rasa empati (kasihan), penghindaran, kebencian, dan kesan negatif lainnya (Scior, 2016). Stigma dan kepercayaan mengenai kondisi disabilitas juga dapat mempengaruhi keterbatasan Penyandang Disabilitas dalam mengembangkan hubungan sosial (Franklin, 2018). Keberadaan stigma dan berbagai dampak dari stigmatisasi tersebut menyebabkan Penyandang Disabilitas membutuhkan banyak dukungan agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Pada konteks regional, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur telah memiliki inisiatif yang konkrit dalam merespon kondisi ketidakberdayaan, diskriminasi, dan stigmatisasi yang dialami oleh Penyandang Disabilitas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 mengesahkan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Disabilitas. Secara kronologis, peraturan daerah tersebut bahkan sudah terlebih dahulu disahkan sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satu poin yang diatur dalam peraturan daerah tersebut adalah bahwa pemerintah berkewajiban mendorong dunia usaha dan masyarakat untuk memberikan perlindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah menerbitkan aturan turunan terkait tata pelaksanaan peraturan daerah tersebut melalui Peraturan Gubernur Nomor 215 tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013.

Keberadaan payung hukum pada tingkat provinsi tersebut menjadi landasan terkait adanya kewajiban bagi pemerintah pada jajaran di bawahnya untuk menaati seluruh poin yang telah diatur, termasuk bagi Kabupaten Madiun. Pada tahun 2022, Kabupaten Madiun menduduki peringkat ke-22 terkait jumlah Penyandang Disabilitas di wilayahnya untuk cakupan akumulatif tingkat Provinsi Jawa Timur (Bappenas, 2022). Meskipun apabila dikomparasikan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur jumlahnya tidak terlalu signifikan, total Penyandang Disabilitas di Kabupaten Madiun pada tahun 2022 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2022 tercatat persentase peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Madiun hingga mencapai 40,27%. Total Penyandang Disabilitas di Kabupaten Madiun telah mencapai 6.623 jiwa pada tahun 2022 (SDI, 2023). Secara komposisi, Kecamatan Wungu menyumbang sekitar 8,31% dari total jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Madiun. Dengan kata lain, tercatat sekitar 551 Penyandang Disabilitas yang berada di Kecamatan Wungu. Jumlah tersebut meningkat apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Kecamatan Wungu merupakan salah satu wilayah ring 1 dari PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Madiun. Mempertimbangkan keberadaan Penyandang Disabilitas

sebagai salah satu kelompok rentan yang berada di sekitar wilayah operasinya, pihak PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Madiun berinisiatif untuk mendukung pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Disabilitas dengan program inovasi sosial Batik Ramli (Batik Ramah Lingkungan). Melalui inovasi sosial Batik Ramli, pihak perusahaan berupaya mewujudkan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan dan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas secara simultan dan inklusif.

Sasaran utama penerima manfaat inovasi sosial Batik Ramli adalah Penyandang Disabilitas yang berada pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Panti Asuhan Anak Luar Biasa "Asih" Yayasan Ar-Razzaq di Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Proses implementasi inovasi sosial Batik Ramli dilakukan melalui enam tahapan yang mencakup (1) identifikasi awal atau *prompts*; (2) pengusulan strategi inovasi sosial atau *proposals*; (3) implementasi purwarupa/percontohan yang sudah direncanakan atau *prototypes*; (4) keberlanjutan kegiatan inovasi sosial atau *sustaining*; (5) pengembangan dan penyebarluasan inovasi sosial atau *scaling*; dan (6) perubahan sistemik melalui inovasi sosial atau *systemic change* (Caulier-Grice, et al., 2012). Artikel ini berusaha mendeskripsikan masing-masing tahapan inovasi sosial pada Program Batik Ramli dalam mengupayakan penanganan masalah sosial yang dialami Penyandang Disabilitas di Panti Asuhan Anak Luar Biasa "Asih" Yayasan Ar-Razzaq Kecamatan Wungu secara inovatif dan komprehensif.

METODE PENELITIAN

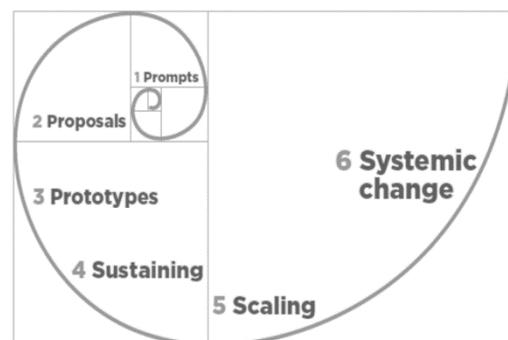
Pendekatan yang digunakan pada pembahasan inovasi sosial Batik Ramli adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki tendensi untuk menelaah proses dan kasus sosial serta menitikberatkan pada interpretasi fenomena tersebut, terutama mengenai bagaimana seseorang menciptakan pemahaman dan makna sosial (Neuman, 2014). Penelitian kualitatif juga dapat diartikan

sebagai proses yang dipakai untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai fenomena sosial dengan melakukan pengumpulan data lewat interaksi kepada partisipan penelitian (Lincoln, 2005). Data pada studi ini dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Program Inovasi Sosial Batik Ramli.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara gradual, pelaksanaan inovasi sosial perlu melalui beberapa tahap yang berurutan. Tahap-tahap tersebut mencakup *prompts*, *proposals*, *prototypes*, *sustaining*, *scaling*, dan *systemic change* (Caulier-Grice, et al., 2012). *Prompt* dan *proposal* merupakan dua tahap awal yang berkaitan dengan fase perencanaan. Selanjutnya, *prototype* dan *sustaining* mencakup tahap pelaksanaan beserta upaya untuk menjaga keberlanjutannya. Sementara itu, tahap *scaling* dan *systemic change* berkaitan pada upaya eskalasi inovasi sosial agar mampu menimbulkan dampak perubahan positif pada skala yang lebih luas dan komprehensif. Inovasi Sosial Batik Ramli (Batik Ramah Lingkungan) sebagai program pemberdayaan yang sudah berlangsung lebih dari tiga tahun telah melalui serangkaian proses mulai dari *prompt* hingga perubahan sistemik

Gambar 1. Spiral Tahap Pengembangan Inovasi Sosial



Sumber: Caulier-Grice, et al., 2012

Tahap *prompts* dalam perencanaan inovasi sosial Batik Ramli dimulai dengan mengidentifikasi kelompok

rentan yang membutuhkan pertolongan, masalah sosial paling krusial yang sedang dihadapi, dan potensi apa yang dapat diutilisasi untuk mengubah kondisi tersebut. Fase awal ini ditujukan untuk menetapkan kelompok paling rentan yang perlu diintervensi sehingga kemudian dapat dirumuskan penyesuaian antara masalah sosial yang dialami dengan potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif solusi. Proses perencanaan pada tahap ini dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti pemerintah setempat, pelaku usaha, organisasi sipil, termasuk institusi yang menaungi keberadaan kelompok-kelompok rentan pada wilayah tersebut.

Umumnya, tahap awal inovasi sosial dimulai dengan proses pemetaan sosial yang mencakup proses identifikasi berbagai komponen masyarakat pada suatu wilayah seperti eksistensi institusi sosial, gambaran berbagai jenis sumber daya, hingga analisis peluang pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan lokalitas pada wilayah tersebut. Cakupan unit analisis pada kajian pemetaan sosial biasanya terbatas pada lingkup wilayah desa atau kelurahan. Terkait konteks inovasi sosial yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Madiun, salah satu wilayah yang menjadi lingkup pemetaan sosial perusahaan adalah Desa Karangrejo,

Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Berdasarkan hasil pemetaan sosial pada tahun 2021, teridentifikasi bahwa salah satu kelompok rentan di wilayah tersebut adalah Penyandang Disabilitas yang berada dibawah naungan LKS Panti Asuhan Anak Luar Biasa "Asih" Yayasan Ar-Razzaq. Masalah sosial yang dialami oleh Penyandang Disabilitas tersebut adalah ketidakberdayaan akibat minimumnya kepemilikan aset dan akses untuk pengembangan diri. Hasil pemetaan sosial mengindikasikan adanya potensi alam berupa limbah organik dedaunan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan batik dan potensi keterampilan pembuatan batik ciproat. Selain itu, kajian pemetaan sosial juga mengidentifikasi adanya

masalah lingkungan berupa limbah pengolahan batik yang belum terkelola secara ramah lingkungan

Setelah mengetahui fokus kelompok rentan yang akan diintervensi, masalah sosial yang dialami, dan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menangani masalah, pihak PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Madiun beserta para pemangku kepentingan setempat melakukan diskusi penyusunan rencana kerja sebagai manifestasi dari tahap *proposals*. Terkait tahap *proposals*, para pemangku kepentingan merumuskan model inovasi sosial sebagai cara baru untuk menangani masalah sosial yang dialami oleh kelompok rentan. Kemudian, model pengembangan inovasi sosial dirancang untuk dapat direalisasikan secara bertahap dan menyesuaikan dengan potensi yang eksis. Sebelum proses inovasi sosial dilakukan, telah diketahui bahwa Penyandang Disabilitas di LKS Panti Asuhan Anak Luar Biasa "Asih" Yayasan Ar-Razzaq telah memiliki keterampilan dasar untuk membuat batik, salah satunya dengan metode ciproat. Oleh karena itu, model inovasi sosial yang diterapkan berbasis kepada kegiatan membatik dengan metode ramah lingkungan.

Manifestasi dari proses membatik yang berkesadaran ekologi kemudian diwujudkan pada tahap *prototyping* dengan dua basis, yaitu metode dan bahan baku ramah lingkungan. Pada tahap ini, metode ramah lingkungan yang diterapkan berwujud sebuah sistem Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL). Sementara itu, bahan baku ramah lingkungan yang dimanfaatkan dalam proses pembuatan batik adalah limbah dedaunan yang bersifat organik dan tidak berbahaya secara kimia bagi Penyandang Disabilitas. Penerapan metode pengolahan limbah menggunakan IPAL dan pemanfaatan limbah organik sebagai bahan baku merupakan kesatuan sistem yang saling melengkapi. Keberadaan IPAL sebagai alat pengolah air limbah proses membatik difungsikan agar lahan seluas sekitar 0,2 hektar di dekat lokasi kegiatan tidak lagi tercemar residu sisa aktivitas produksi. Selain itu, proses *prototyping* juga dilakukan dengan membuat purwarupa produk *ecoprint* sebagai inovasi dari produk batik ciproat yang sebelumnya telah

dikembangkan. *Ecoprint* yang diproduksi memanfaatkan warna alami dari limbah dedaunan sehingga bersifat organik dan ramah lingkungan. Setelah diproduksi, purwarupa produk tersebut kemudian diberikan label dan dikemas agar lebih menarik. Suvenir *ecoprint* tersebut kemudian menjadi produk sekaligus karya unggulan dari Penyandang Disabilitas di LKS Panti Asuhan Anak Luar Biasa "Asih" Yayasan Ar-Razzaq.

Upaya untuk menjaga keberlanjutan kegiatan yang sudah diinisiasi, Program Inovasi Sosial Batik Ramli kemudian dikembangkan pada tahap *sustaining* agar menjadi aktivitas pemberdayaan Penyandang Disabilitas LKS Panti Asuhan Anak Luar Biasa "Asih" Yayasan Ar-Razzaq menjadi berkelanjutan. Upaya yang dilakukan pada tahap *sustaining* ini antara lain membangun *shelter* batik, pelatihan *ecoprint* tingkat lanjutan, melakukan diversifikasi produk dan mendaftarkan HAKI merk dagang *ecoprint*. Secara kronologis, tahapan ini dilakukan pada tahun 2022 sebagai tahun kedua pengembangan Program Inovasi Sosial Batik Ramli.

Pembangunan *shelter* batik difungsikan sebagai sentra produksi untuk mendukung proses kreasi dan aktualisasi diri Penyandang Disabilitas dalam membuat kerajinan *ecoprint*. Selain itu, sarana *shelter* juga dapat menjadi sarana edukasi bagi pengunjung eksternal yang berminat untuk belajar membuat batik *ecoprint* bersama para Penyandang Disabilitas. Selain sarana fisik, pada tahap ini juga dilakukan pemutakhiran keterampilan kelompok sasaran dalam membuat kreasi *ecoprint*. Pemutakhiran dilakukan melalui pelatihan tingkat lanjut agar kemampuan sensorik dan motorik dari Penyandang Disabilitas dapat lebih terstimulasi dan terasah sehingga dapat lebih terampil dalam berkreasi membuat kerajinan *ecoprint*. Kemudian, penerima manfaat program inovasi sosial juga dibekali keterampilan untuk diversifikasi produk kerajinan seperti dalam bentuk masker, tas, kaos, sandal, jilbab, hingga perlengkapan ibadah. Diversifikasi tersebut ditujukan agar peluang pemasaran produk semakin terbuka dan dapat menjangkau berbagai segmen konsumen. Agar produk hasil

kreasi Penyandang Disabilitas memperoleh perlindungan hukum dan pengakuan resmi, PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Madiun juga membantu proses pendaftaran HAKI dari merk dagang produk-produk kreasi *ecoprint*.

Pada tahun 2023, Program Inovasi Sosial Batik Ramli telah memasuki fase *scaling*. Tahap ini menitikberatkan pada bagaimana para pengelola program mengupayakan pengembangan kegiatan hingga replikasi pengetahuan. Awal pengembangan dilakukan dengan diversifikasi kegiatan inovasi sosial menjadi dua jenis, yaitu lini industri kreasi *ecoprint* dan aktivitas usaha di bidang agribisnis. Ekspansi pada sektor agribisnis dilakukan untuk menambah variasi kegiatan pemberdayaan Penyandang Disabilitas serta mendukung upaya ketahanan pangan melalui pembuatan *family garden*, budidaya unggas dan perikanan. Pada lini usaha baru tersebut, PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Madiun juga mendukung pengembangan budi daya lumut sebagai pakan alternatif ikan dan unggas. Dukungan tersebut ditujukan agar terdapat efisiensi pakan dalam kegiatan budi daya ikan dan unggas.

Selain diversifikasi kegiatan baru, proses pengembangan program inovasi sosial Batik Ramli juga dilakukan melalui berbagai upaya optimalisasi. Pengembangan inovasi sosial melalui kegiatan optimalisasi dilakukan pada aspek prasarana fisik dan nonfisik. Terkait prasarana fisik, terdapat kendala inefisiensi penggunaan air untuk kegiatan agribisnis sehingga pengelola program berinisiatif untuk mengoptimalkan IPAL dan dimutakhirkan agar terintegrasi dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penyiraman di *family garden*. Selanjutnya, optimalisasi prasarana fisik juga dilakukan dengan mengadopsi energi terbarukan berbasis tenaga surya. Pemanfaatan tenaga surya tersebut juga ditujukan untuk efisiensi biaya listrik dalam kegiatan pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Terkait optimalisasi pada prasarana nonfisik, PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Madiun berinisiatif untuk mengembangkan piranti lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembukuan elektronik dengan nama "Inclusive Wallet / I-wallet". Pembuatan aplikasi

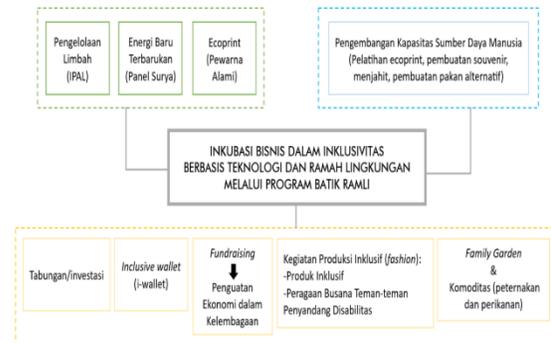
tersebut ditujukan agar mempermudah administrasi pembukuan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk *ecoprint* sehingga pencatatan keuangan dapat dilakukan secara lebih rapi dan sistematis. Aplikasi tersebut juga telah dilengkapi dengan fitur yang memudahkan Penyandang Disabilitas dalam penggunaannya.

Proses pengembangan Inovasi Sosial Batik Ramli juga dilakukan melalui replikasi pengetahuan. Penerima manfaat dari Program Batik Ramli tidak diarahkan untuk tidak sekedar memperoleh pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat bermanfaat untuk dirinya saja. Melalui inovasi sosial ini, penerima manfaat didorong untuk dapat menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh kepada masyarakat luas. Praktik replikasi pengetahuan tersebut bertujuan agar penerima manfaat tidak sekedar menjadi objek program pemberdayaan, namun juga mampu menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serupa sehingga muncul katalis-katalis perubahan baru untuk menjangkau dampak yang lebih luas. Salah satu penerima manfaat inovasi sosial Batik Ramli yang telah melakukan replikasi pengetahuan adalah Ibu Sunarsih. Beliau berkesempatan menjadi narasumber pelatihan *ecoprint* yang diselenggarakan di Kantor Desa Karangrejo pada tanggal 17 September 2023. Melalui replikasi pengetahuan tersebut, Ibu Sunarsih telah mampu melakukan transfer keterampilan pembuatan kerajinan *ecoprint* kepada peserta yang hadir.

Melalui serangkaian proses pengembangan inovasi sosial mulai dari tahap *prompt* hingga *scaling*, Program Batik ramli telah berhasil menimbulkan dampak perubahan sistemik. Unsur perubahan yang dilakukan menitikberatkan pada sistem tata kelola pembinaan Penyandang Disabilitas di LKS Panti Asuhan Anak Luar Biasa "Asih" Yayasan Ar-Razzaq yang awalnya berbasis pada kegiatan karitatif-filantropis menjadi aktivitas pemberdayaan yang partisipatif dan inklusif. Adanya perubahan sistemik melalui penerapan pemberdayaan tersebut, inovasi sosial Batik Ramli mampu menciptakan

dampak secara multidimensi. Secara skematik, rancangan penciptaan dampak multidimensi pada Program Batik Ramli dikemas dalam sistem inkubasi bisnis dengan rangkaian proses sebagai berikut:

Gambar 2. Skema Program Inovasi Sosial Batik Ramli



Sumber: PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Madiun, 2023.

Adapun dimensi dampak yang berhasil ditimbulkan mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan. Terkait dampak pada dimensi sosial, Program Inovasi Sosial Batik Ramli telah dapat menciptakan ruang aktualisasi diri yang produktif dan inklusif bagi 34 Penyandang Disabilitas sebagai penerima manfaat langsung dan 1.208 orang lainnya sebagai penerima manfaat tidak langsung. Secara ekonomi, perubahan sistematis yang diterapkan telah menghasilkan pendapatan dan penghematan. Pendapatan yang diperoleh selama 3 tahun berjalannya program telah mencapai Rp31.514.748. Sementara itu, total penghematan per tahun yang dicapai senilai Rp22.413.292 yang terdiri dari penghematan biaya listrik per tahun senilai Rp2.288.404 akibat pemanfaatan tenaga surya dan efisiensi biaya PDAM sebesar Rp20.142.888 per tahun. Program yang menitikberatkan sistem yang ramah lingkungan, Inovasi Sosial Batik Ramli juga telah berkontribusi pada pencemaran kontaminasi limbah pengolahan batik terhadap lahan dengan luas 0,2

hektar serta pengurangan penggunaan air untuk penyiraman *family garden* sebanyak sekitar 3,65 m³ per tahun. Selain itu, inovasi sosial ini juga telah menimbulkan dampak pada dimensi kesejahteraan berupa penyediaan akses peningkatan kapabilitas terhadap 39 orang penerima manfaat yang terdiri dari 34 anak Penyandang Disabilitas dan 5 orang pendamping. Dengan kata lain, Program Inovasi Sosial Batik Ramli telah dapat menciptakan dampak secara multidimensi melalui penerapan cara baru dalam pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Panti Asuhan Anak Luar Biasa "Asih" Yayasan Ar-Razzaq.

KESIMPULAN

Kecamatan Wungu sebagai salah satu wilayah Ring 1 di sekitar PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Madiun mengalami peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas pada tahun 2022. Peningkatan tersebut menjadi isu strategis dalam konteks pemberdayaan Penyandang Disabilitas sebagai upaya mengakomodasi pembangunan masyarakat yang inklusif. PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Madiun telah menginisiasi kolaborasi sinergis dalam memberdayakan Penyandang Disabilitas di Desa Karangrejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Kolaborasi tersebut terkonfigurasi dalam program inovasi sosial bertema "Batik Ramli" atau Batik Ramah Lingkungan.

Melalui kolaborasi yang komprehensif, inovasi sosial Batik Ramli telah melewati serangkaian tahapan pengembangan mulai dari fase *prompt* sebagai tahap awal identifikasi masalah dan potensi hingga penciptaan perubahan sistemik. Secara inklusif, program inovasi sosial Batik Ramli telah merangkul 34 Penyandang Disabilitas yang diberdayakan melalui Inkubasi Bisnis dalam Inklusivitas berbasis Teknologi dan Ramah Lingkungan. Mulai dari tahap perencanaan hingga penciptaan perubahan sistemik, inovasi sosial Batik Ramli mampu mengedepankan prinsip inklusivitas dengan mengakomodasi keterlibatan Penyandang Disabilitas secara aktif sebagai subjek pemberdayaan masyarakat. Alhasil, program inovasi sosial Batik Ramli telah menimbulkan dampak secara multidimensi

yang mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan bagi beragam penerima manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2022). *Perencanaan dan Penganggaran Inklusif Disabilitas*. DKI Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas.
- BPS. (2023). *Analisis Tematik Kependudukan*. DKI Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Caulier-Grice, J., Davies, A., Patrick, R., & Norman, W. (2012). *The Theoretical, Empirical, and Policy Foundations for Building Social Innovation in Europe*. Brussels: The Young Foundation.
- DPR. (2022). *Menilik Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas*. DKI Jakarta: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Franklin, A. e. (2018). Children with albinism in African regions: their rights to 'being' and 'doing'. *BMC International Health and Human Rights*, 18:2, 1-8.
- Kemenkes. (2014). *Situasi Penyandang Disabilitas*. DKI Jakarta: Pusdatin Kementerian Kesehatan RI.
- Lincoln, Y. S. (Eds.). (2005). *The sage handbook of qualitative research (3rd edition)*. London: Sage Publications.
- Mostert, M. (2016). Stigma as a barrier to the implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Africa. *African Disability Rights Yearbook*, 2-24.
- Neuman, W. L. (1994). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (2nd edition)*. Allyn and Bacon.
- Rohwerder, B. (2018). *Disability Stigma in Developing Countries Question*. Brighton: Institute of Development Studies.
- Scior, K. (2016). Towards Understanding Intellectual Disability Stigma: Introduction. Dalam K. & Scior, *Intellectual Disability and Stigma: Stepping Out from the Margins*. (hal. -). Palgrave: Macmillan.

SDI. (2023). Jumlah penyandang disabilitas berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten

Madiun. Jakarta Pusat: Satu Data Indonesia.